

BAB III

**INTEGRASI KODE ETIK BANKIR DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
DENGAN TIDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

3.1 Integrasi Kode Etik Bankir dalam Aturan Hukum

1. Pentingnya Integritas dan Etika Dalam Sektor Perbankan

Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku merupakan suatu aspek penting dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Aspek kepatuhan ini dapat dibagi menjadi lima hal utama. Pertama, kebijakan umum mencakup kewajiban untuk patuh kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. Ini melibatkan pemegangan teguh terhadap komitmen dan memberikan kontribusi positif kepada lingkungan di sekitar perusahaan. Kedua, kebijakan organ perusahaan menekankan pada kepastian bahwa perusahaan dikelola tanpa adanya benturan kepentingan. Ketiga, kebijakan pegawai bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan budaya perusahaan kepada seluruh pegawai. Keempat, kebijakan ini mencakup manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Kelima, kebijakan ini juga mengacu pada pengembangan sistem pengendalian internal guna memastikan integritas dan akurasi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Keseluruhan dari kelima kebijakan ini menciptakan landasan yang kokoh bagi kepatuhan perusahaan terhadap norma hukum dan regulasi yang berlaku. Dengan menjalankan kebijakan-kebijakan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap aspek kegiatan mereka sesuai dengan

standar etika dan hukum yang ditetapkan, serta memberikan dampak positif pada berbagai aspek, termasuk lingkungan dan masyarakat sekitar.¹

Integritas seorang bankir memainkan peran kunci sebagai garis pertahanan utama suatu bank. Keberhasilan dan keberlanjutan suatu bank sangat bergantung pada bankir yang tidak hanya memiliki keterampilan yang mumpuni dan kompeten, tetapi juga integritas yang tinggi. Pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip integritas menjadi esensial, mengingat bankir berfungsi sebagai fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas sektor perbankan.²

Dalam era modern yang didukung oleh teknologi canggih dan sistem kontrol internal yang kuat, peran bankir sebagai pelaksana *Standard Operational Procedure* (SOP) dengan disiplin tinggi menjadi kunci keberhasilan. Meskipun teknologi dan kontrol internal dapat memberikan efisiensi, keberhasilan sebenarnya terletak pada ketaatan dan integritas setiap bankir terhadap SOP yang ketat.³

Penggunaan teknologi dan sistem kontrol internal yang canggih hanya akan memberikan hasil optimal jika dikelola oleh bankir yang memegang teguh integritasnya. Adanya SOP yang ketat menjadi pedoman yang mengarahkan bankir untuk bertindak dengan kepatuhan dan integritas. Dalam konteks ini, SOP tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai panduan moral yang membentuk perilaku etis setiap bankir. Skandal perbankan yang terjadi secara

¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Eksistensi Perbankan dalam Dinamika Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2020, h. 241

² Arus Akbar Silondae, Integritas Atau Efektivitas Hukum Sebagai Faktor Dominan Dalam Terjadinya Fraud Perbankan, *JURNAL KIP* Vol. IV. No. 1, Maret 2015 – Juni 2015

³ Rapina dan Leo Cristyanto, "Peranan Sistem Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Operasional Pada Siklus Persediaan dan Pergudangan", *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi* Nomor 06 Tahun ke-2 September-Desember 2011

berkala seringkali dapat ditelusuri kembali pada kurangnya integritas dari oknum bankir yang melihat peluang untuk melakukan tindakan yang merugikan karena kelemahan dalam sistem atau kurangnya pengawasan.

Bankir yang memiliki kedisiplinan tinggi dan selalu patuh pada SOP menciptakan lapisan pertahanan yang kokoh terhadap potensi skandal perbankan. Integritas menjadi nilai inti yang mendorong bankir untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan mereka. Investasi jangka panjang dalam membangun dan memelihara integritas bankir membawa dampak positif bagi kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat keberlanjutan dan keberhasilan, setiap bank harus memprioritaskan pengembangan dan pemeliharaan integritas bankir sebagai bagian terintegrasi dari strategi operasionalnya.

Subardjo Joyosumarto (2011) menekankan pentingnya peningkatan integritas bankir. Integritas harus menjadi nilai dasar yang melekat dalam lingkungan dan budaya kerja bank. Dalam menjalankan operasional bank, bankir harus secara konsisten mencerminkan nilai tersebut. Penanaman nilai dasar ini harus terus dilakukan melalui pendidikan moral dan etika bankir, serta syarat dan indikator kenaikan jabatan, penilaian keberhasilan individu bankir, dan langkah-langkah lainnya.⁴

Jika upaya ini berhasil dilakukan, bank akan mengalami sejumlah manfaat yang signifikan. Pertama-tama, integritas bankir akan menjadi tak terbantahkan, menciptakan citra bank yang dapat diandalkan dan reputasi yang kuat. Membangun

⁴ *Ibid.*

reputasi seperti ini memerlukan waktu yang panjang, dilakukan secara bertahap, dan pada akhirnya menjadi cermin dari nilai-nilai yang dianut oleh bank itu sendiri.

Merawat reputasi bank juga membutuhkan investasi energi yang tidak sedikit. Meskipun demikian, kepercayaan publik dan reputasi baik akan menjadi milik bank jika bank mampu membangun integritas yang didasarkan pada kepercayaan (*trust*), kehati-hatian (*prudential*), dan kepatuhan (*compliance*).⁵ Dengan demikian, keberhasilan dalam hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat internal dalam bentuk integritas yang kokoh, tetapi juga akan menciptakan kepercayaan eksternal dan reputasi positif yang berkelanjutan.

3.2 Prinsip-Prinsip Kode Etik Bankir Yang Diintegrasikan Terkait Dengan Tidak Pidana Pencucian Uang

a. Prinsip Patuh terhadap Perundang-Undangan

Tindak pidana Pencucian Uang memiliki dampak yang sangat serius, tidak hanya terbatas pada stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat mengancam aspek fundamental kehidupan bersama dalam masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang, diperlukan landasan hukum yang kuat. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta memungkinkan

⁵ Titi Fatmawinarti, “Analisis Pengaruh Nilai Nasabah, Reputasi Dampaknya Untuk Meningkatkan Minat Menabung Nasabah Melalui Kepercayaan”, Tesis, Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar, 2019, h. 15

penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut. Dengan demikian, upaya pencegahan dan pemberantasan dapat dilakukan secara efisien dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

Berdasarkan Pasal 3, menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan serangkaian tindakan terkait Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut, dapat dipidana karena melakukan tindak pidana Pencucian Uang.

Sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana Pencucian Uang tersebut mencakup pidana penjara dengan durasi paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda dengan jumlah paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ini mencerminkan tingkat seriusnya tindakan pencucian uang dan bertujuan untuk memberikan efek jera serta memberikan sanksi yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan.

Maka, ketika bankir mengetahui hal tersebut lewat penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC), Bankir tersebut harus melaporkan hal tersebut kepada PPATK yaitu tempat pelaporan dan pengawasan terkait transaksi keuangan yang mencurigakan, di mana ada indikasi bahwa Harta Kekayaan yang terlibat dalam transaksi tersebut dapat dihubungkan dengan kegiatan kriminal atau tindak pidana tertentu. Prosedur ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan sistem keuangan untuk pencucian uang atau pembiayaan terorisme, serta

melibatkan kerjasama antara pihak pelapor dan otoritas yang bertanggung jawab dalam mengatasi kejahatan keuangan.⁶

Prosedur ini tidak hanya menciptakan kerjasama antara pihak pelapor, dalam hal ini bankir, dan otoritas yang bertanggung jawab dalam mengatasi kejahatan keuangan, tetapi juga menunjukkan integritas bankir sebagai garis pertahanan utama suatu bank. Dalam konteks ini, integritas menjadi nilai kunci yang mendorong bankir untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan mereka, termasuk melaporkan transaksi mencurigakan.

Pentingnya integritas bankir juga terlihat dalam menjalankan operasional bank. Subardjo Joyosumarto menekankan bahwa integritas harus menjadi nilai dasar yang melekat dalam lingkungan dan budaya kerja bank. Bankir harus mencerminkan nilai integritas tersebut dalam tindakan sehari-hari mereka, dan penanaman nilai dasar ini terus dilakukan melalui pendidikan moral, etika bankir, serta syarat dan indikator kenaikan jabatan.

Pentingnya ketaatan terhadap regulasi, yang menjadi pondasi utama dalam menciptakan lingkungan perbankan yang stabil, aman, dan dapat dipercaya, juga menjadi fokus utama dalam pengintegrasian prinsip kode etik. Seorang bankir yang mematuhi prinsip kode etik tidak hanya berkomitmen untuk bertindak secara etis dan profesional, tetapi juga mengambil peran aktif dalam menjaga reputasi industri perbankan dan memberikan kepercayaan kepada nasabah serta pihak-pihak terkait.⁷

⁶ Erdiansyah, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1, 2020.

⁷ Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan : Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, h. 58

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang didorong oleh prinsip kode etik bankir, menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan sistem keuangan untuk aktivitas ilegal. Dengan demikian, pengintegrasian prinsip kode etik bankir tidak hanya memastikan ketaatan terhadap regulasi terkait pencucian uang, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi perbankan sebagai bagian dari upaya lebih luas dalam melawan kejahatan keuangan.

b. Prinsip Pencatatan yang Benar

Prinsip pencatatan yang benar, sebagaimana tercermin dalam kode etik bankir, memiliki keterkaitan erat dengan integritas seorang bankir. Integritas, sebagai nilai inti yang mendorong bankir untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan mereka, memiliki dampak langsung pada keberhasilan dan keberlanjutan suatu bank.

Dalam era modern yang didukung oleh teknologi canggih dan sistem kontrol internal yang kuat, peran bankir sebagai pelaksana *Standard Operational Procedure* (SOP) dengan disiplin tinggi menjadi kunci keberhasilan. Pencatatan yang benar, sebagai bagian dari SOP, bukan hanya merupakan aturan formal, tetapi juga menjadi pedoman moral yang membentuk perilaku etis setiap bankir. Ini mencerminkan ketaatan dan integritas setiap bankir terhadap SOP yang ketat, yang bertujuan untuk mencegah kelemahan dalam sistem atau kurangnya pengawasan yang dapat mengarah pada potensi skandal perbankan.

Bankir yang memiliki kedisiplinan tinggi, selalu patuh pada SOP, dan memastikan prinsip pencatatan yang benar, menciptakan lapisan pertahanan yang

kokoh terhadap potensi skandal perbankan. Integritas menjadi nilai yang mendorong bankir untuk bertindak dengan kepatuhan dan integritas, membentuk dasar untuk reputasi bank yang dapat diandalkan.

Pendidikan moral, etika bankir, dan syarat kenaikan jabatan yang diterapkan oleh bank menciptakan bankir yang mencerminkan tingkat integritas yang tinggi dalam menjalankan operasional bank. Bankir yang berkomitmen pada nilai-nilai integritas memiliki kemungkinan lebih kecil untuk terlibat dalam kegiatan pencucian uang yang merugikan reputasi bank dan merugikan masyarakat.

Keberhasilan dalam membangun integritas bankir membawa manfaat positif bagi pencegahan pencucian uang. Citra bank yang dapat diandalkan dan reputasi yang kuat, yang muncul dari integritas bankir yang tak terbantahkan, menjadi penghalang bagi upaya pencucian uang. Kepercayaan publik dan reputasi baik yang dimiliki oleh bank sebagai hasil dari integritas yang ditanamkan dalam kultur perusahaan dapat menjadi penangkal efektif terhadap praktik-praktik pencucian uang.⁸

Pentingnya prinsip pencatatan yang benar yang diintegrasikan dalam SOP (Standard Operational Procedure) tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dampak moral yang sejalan dengan nilai integritas bankir. Pencatatan yang benar menjadi instrumen penting dalam memastikan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi perbankan. Dengan menerapkan prinsip pencatatan yang benar, bank tidak hanya menjalankan kewajiban teknis, tetapi juga

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang”, diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Prinsip-Mengenal-Nasabah-dan-Anti-Pencucian-Uang.aspx> diakses pada 10 November 2023

menunjukkan komitmen moral untuk menghindari keterlibatan dalam praktik pencucian uang.

Secara keseluruhan, integrasi nilai integritas dalam budaya kerja bank, bersama dengan penerapan prinsip pencatatan yang benar, tidak hanya memberikan dasar teknis untuk keberhasilan operasional bank, tetapi juga menjadi fondasi moral yang kuat dalam melawan pencucian uang. Kombinasi ini memperkuat kepercayaan masyarakat, stabilitas sektor perbankan, dan reputasi positif bank, semuanya merupakan elemen penting dalam upaya pencegahan pencucian uang.

c. Prinsip Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Prinsip tidak menyalahgunakan wewenang oleh bankir merupakan pilar fundamental dalam menerapkan integritas bankir, terutama dalam menghadapi tantangan tindak pidana pencucian uang. Integritas ini mencerminkan komitmen bankir untuk bertindak secara etis, transparan, dan tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya. Dalam konteks pencegahan pencucian uang, prinsip ini memiliki dampak signifikan.

Bankir diwajibkan untuk selalu beroperasi dalam batas-batas hukum dan regulasi yang berlaku, menjunjung tinggi prinsip kepatuhan. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang untuk mengelak dari tanggung jawab melakukan verifikasi identitas pelanggan, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip *Know Your Customer* (KYC). Penggunaan wewenang juga harus disertai dengan transparansi

dan pertanggungjawaban, dimana setiap keputusan atau tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁹

Prinsip tidak menyalahgunakan wewenang juga mendorong bankir untuk aktif melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tidak ada ruang untuk penyalahgunaan wewenang guna menyembunyikan indikasi pencucian uang atau mengabaikan kewajiban melaporkan aktivitas mencurigakan tersebut.

Komitmen pada integritas pribadi merupakan aspek penting dalam menerapkan prinsip ini. Bankir harus menyadari bahwa integritas pribadi mereka adalah lapisan pertahanan utama dalam menghindari terlibat dalam praktik pencucian uang. Prinsip ini juga mendorong bankir untuk terus meningkatkan pemahaman mereka melalui pelatihan dan pendidikan terkait etika, kepatuhan, dan tindakan pencegahan pencucian uang.

Adanya mekanisme sanksi internal menjadi implementasi konkrit dari prinsip tidak menyalahgunakan wewenang. Bank harus memiliki prosedur yang jelas untuk menangani pelanggaran integritas dan penyalahgunaan wewenang, termasuk tindakan disipliner atau pemecatan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Dengan menjalankan prinsip tidak menyalahgunakan wewenang ini, bankir tidak hanya menjaga integritas sektor perbankan, tetapi juga memainkan peran yang

⁹ Martono Anggusti, *Pengelolaan Perusahaan & Kesejahteraan Tenaga Kerja*, Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2018, h. 30

krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat, menghindari risiko pencucian uang, dan memastikan bahwa setiap transaksi berada dalam kerangka hukum dan etika yang benar.

Mengintegrasikan kode etik bankir dengan ketentuan hukum, terutama terkait tindak pidana pencucian uang, merupakan sebuah tantangan yang kompleks dan memerlukan penanganan yang cermat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah adanya ketegangan potensial antara prinsip-prinsip etika yang dianut oleh bankir dan persyaratan ketat yang diatur oleh hukum terkait pencucian uang.

Bankir sering kali dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga rahasia nasabah sesuai dengan etika profesi mereka. Namun, dalam pencucian uang, terdapat persyaratan ketat terkait pelaporan dan kerjasama dengan otoritas penegak hukum. Ini menciptakan dilema di mana bankir harus menemukan keseimbangan antara menjaga privasi nasabah dan mematuhi kewajiban pelaporan yang diatur oleh hukum.¹⁰

Penerapan teknologi dalam proses pemantauan transaksi dapat membantu menciptakan keseimbangan ini. Dengan sistem yang canggih, bankir dapat lebih efisien dalam mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan tanpa harus mengorbankan rahasia nasabah secara berlebihan. Namun, penggunaan teknologi ini juga harus didukung oleh kebijakan yang tepat dan pengetahuan staf tentang cara memanfaatkannya secara etis.

¹⁰ Mohammad Fadarisman, "Implementasi Keterbukaan Rahasia Bank Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry) Dalam Kontruksi Kepastian Hukum", Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Adanya kebijakan yang transparan dan komunikasi yang terbuka dari pihak bank dapat membantu mengelola harapan nasabah terkait privasi dan kepatuhan hukum. Edukasi nasabah tentang pentingnya pelaporan transaksi mencurigakan juga dapat membantu menciptakan pemahaman bersama tentang upaya pencegahan pencucian uang.

Keseimbangan antara rahasia nasabah dan kepatuhan hukum merupakan komitmen yang terus menerus. Bankir perlu secara aktif memperbarui kebijakan dan prosedur mereka sesuai dengan perubahan regulasi dan teknologi, sambil tetap mengedepankan nilai-nilai etika profesi. Dengan demikian, mereka dapat menjaga integritas industri perbankan, memenuhi tanggung jawab hukum, dan memberikan perlindungan yang optimal kepada nasabah.

Selanjutnya, kompleksitas peraturan dan prosedur hukum terkait pencucian uang juga menjadi tantangan. Bankir perlu memahami secara mendalam ketentuan hukum yang berlaku dan mengintegrasikannya ke dalam praktik sehari-hari mereka. Hal ini melibatkan peningkatan kesadaran, pelatihan, dan pemahaman mendalam terhadap tata cara pelaporan transaksi mencurigakan dan prosedur terkait lainnya.

Tantangan lainnya adalah risiko kesalahan interpretasi atau penerapan yang tidak konsisten terhadap ketentuan hukum. Bankir perlu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam implementasi kode etik dan kepatuhan terhadap hukum memiliki pemahaman yang seragam. Hal ini melibatkan pembentukan mekanisme internal untuk memastikan komunikasi yang efektif dan pemahaman yang benar terkait peraturan hukum tersebut.

Selain itu, perubahan dalam peraturan hukum yang terjadi dari waktu ke waktu juga dapat menjadi tantangan. Bankir perlu terus-menerus memperbarui pengetahuan mereka dan menyesuaikan praktik mereka sesuai dengan perkembangan hukum terkini. Hal ini menuntut keterlibatan aktif dalam pembaruan pelatihan dan pemantauan terhadap perubahan regulasi.

Terakhir, tekanan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi implementasi kode etik dan kepatuhan terhadap hukum. Bankir perlu menjaga independensi dan integritas mereka, serta memiliki mekanisme pelaporan yang aman untuk mengatasi tekanan atau konflik kepentingan yang mungkin muncul.

Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, bankir dapat lebih efektif mengintegrasikan kode etik mereka dengan ketentuan hukum, menciptakan lingkungan perbankan yang etis, patuh hukum, dan responsif terhadap perkembangan regulasi.

